REFORMASI PENDIDIKAN DI INDONESIA

Abdul Haris

Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Wathan Samawa, NTB, Indonesia

E-Mail : aries.abdulharis957@gmail.com

Abstrak : Tulisan ini mencoba untuk menguraikan permasalahan umum yang sering muncul dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang sedianya menjadi jembatan untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya tidak terlepas dari berbagai macam persoalan, mulai dari permasalahan sarana dan prasarana, kesenjangan antara apa yang dipelajari dan diajarkan di sekolah dengan permasalahan hidup yang terjadi di sekitar, tidak relevannya *output* dunia pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja, terbatasnya kesempatan untuk mengenyam pendidikan di sekolah sampai dengan mirisnya nasib guru sebagai agen perubahan dalam lembaga pendidikan selalu menjadi penghias media massa baik cetak maupun elektronik. Untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan tersebut tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan, dibutuhkan kesadaran dan kerjasama berbagai pihak agar permasalahan-permasalahan umum tersebut dapat dikikis perlahan-lahan, dengan harapan tujuan pendidikan yang diamanatkan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia dapat diwujudkan. Tulisan ini dengan segala keterbatasannya berusaha menguraikan berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekaligus menawarkan langkah pemecahannya.

Pendahuluan

Dalam Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1, dijelaskan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Terlihat di sini, betapa idealnya makna pendidikan yang telah dirumuskan oleh para ahli pendidikan tentunya, segala sesuatunya sepertinya tidak ada yang lolos dari definisi ini untuk menunjukkan makna dan eksistensi pendidikan bagi umat manusia, secara khusus Indonesia.

Tentunya dalam setiap pekerjaan yang dilakukan harus memiliki tujuan yang terarah, begitu pula dengan pendidikan, agar tujuannya menjadi terarah, dirumuskanlah tujuan pendidikan secara nasional seperti yang dijelaskan kembali dalam Undang Undang tersebut yaitu Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Bila kita cermati makna dan tujuan pendidikan nasional di atas, segala sesuatu yang dibutuhkan dalam diri manusia telah disebutkan, dan sepertinya tidak ada yang kurang. Namun, yang menjadi permasalahan saat ini, semua makna dan tujuan yang telah disebutkan belum dapat terealisasi dengan maksimal secara nasional. Azyumardi Azra misalnya, menjelaskan bahwa secara garis besar, pencapaian pendidikan nasional masih jauh dari harapan, apalagi untuk mampu bersaing secara kompetitif dengan perkembangan pendidikan pada tingkat global. Baik secara kuantitatif maupun kualitatif, pendidikan nasional masih memiliki banyak kelemahan mendasar. Bahkan-dan yang terpenting dalam konteks pembahasan sekarang, pendidikan nasional menurut banyak kalangan bukan hanya belum berhasil meningkatkan kecerdasan dan keterampilan anak didik, melainkan gagal dalam membentuk karakter dan kepribadian.² Oleh karena itu, perlu untuk merekonstruksi kembali pendidikan nasional, bagian apa saja yang masih membutuhkan sentuhan-sentuhan demi majunya pendidikan nasional, dan terakhir

¹ Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

² Azyumardi Azra. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokrasi. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), hlm. xiii

bagaimana strategi yang harus dilakukan, tulisan ini dengan segala keterbatasan akan mencoba menguraikannya.

Memaknai Kembali Pendidikan, Harapan Pencerahan

Pendidikan memiliki manfaat yang besar dalam kehidupan manusia karena pendidikan merupakan salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan individual maupun sosial. Dalam menjalani kehidupan, tentunya seorang individu memiliki tujuan-tujuan disepanjang kehidupannya serta membutuhkan alat bantu demi mewujudkannya. Pendidikan dan pembelajaran dapat dilakukan di manapun, kapanpun, dan dengan siapapun, seseorang bisa belajar secara mandiri dari media-media yang tersedia di sekitarnya, entah itu buku, keluarga, atau teman-temannya, namun sekolah sebagai sebuah institusi pendidikan yang paling memungkinkan seseorang atau kelompok untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan hidupnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ngainun Naim seorang praktisi pendidikan;

“Rasanya tidak ada yang menafikan arti dan makna penting pendidikan. Hampir semua orang akan sepakat bahwa pendidikan itu memiliki manfaat yang besar dalam dalam kehidupan manusia. Banyak pihak yang meyakini bahwa pendidikan merupakan instrumen yang paling penting sekaligus paling strategis untuk mencapai tujuan individual maupun sosial. Jika seorang individu membangun mimpi-mimpi masa depan yang indah dan menjanjikan dalam kehidupannya, maka ia membutuhkan alat bantu dalam mewujudkannya. Mungkin saja ia bisa belajar dari lingkungan, teman, atau dari membaca buku. Semuanya itu merupakan “jalan” yang membuka ke arah perwujudan mimpi. Tetapi dari semua mekanisme tersebut, pendidikan lewat jenjang sekolah yang paling memungkinkan dan memberikan peluang besar untuk mencapainya. Sebab, sekolah lebih sistematis, terpolo dan memberikan peluang paling besar bagi tercapainya mimpi-mimpi tersebut”.³

Sekolah memegang peranan penting menurut Ngainun Naim dalam mewujudkan tujuan hidup seseorang, walaupun ini tidak bisa digeneralisasikan secara keseluruhan, karena fakta membuktikan bahwa ada orang-orang yang justru tidak mengesyam bangku pendidikan formal atau sekolah dengan berbagai tingkatannya tersebut dapat meraih kesuksesan dalam karier dan bisnis atau yang sejenisnya sehingga memperoleh apa-apa

³ Ngainun Naim. *Rekonstruksi Pendidikan Nasional*. (Yogyakarta : TERAS, 2010), hlm. 7

yang diinginkannya, bahkan lebih sukses dibandingkan dengan orang-orang yang menempuh pendidikan formal di sekolah. Hal ini bukan berarti mereka tidak berpendidikan, karena pendidikan seutuhnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bisa dilakukan kapanpun, dimanapun dengan apa dan siapun. Mereka terus belajar dari pengalaman dalam hal yang digelutinya tanpa kenal menyerah dan terus bangkit di setiap kegagalan, berbenah diri dan belajar dari kegagalan yang dilakukannya.

Hal seperti yang digambarkan di atas memang sering kita saksikan dalam kehidupan, atau mungkin ada orang-orang terdekat kita yang mendapatkan keberuntungan seperti itu, namun kita harus mengakui bahwa tidak banyak orang-orang yang mampu melakukannya, hanya orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat, pantang menyerah, dan terus berupaya saja yang mampu berada di puncak kesuksesan, sedangkan orang-orang yang sukses melalui jenjang pendidikan formal seperti sekolah dan perguruan tinggi jauh lebih banyak lagi.

Manusia, seperti yang disebutkan oleh Ismi Dwi Astuti Nurhaeni dijuluki sebagai *animal educandum* dan *animal educandus* yaitu sebagai makhluk yang dididik dan makhluk yang mendidik.⁴ Terkait dengan julukan ini selanjutnya dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa terlibat dalam proses pendidikan, baik yang dilakukan terhadap orang lain maupun terhadap dirinya sendiri, artinya bahwa pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan keterampilan (*transfer of knowledge and skills*) tetapi juga meliputi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial.

Pendapat diatas sejalan dengan apa yang diharapkan oleh Herwono dalam Ngainun Naim bahwa “Sekolah di masa kin (apalagi, kelak, di masa depan) selayaknya benar-benar sudah menjelma menjadi “sekolah kehidupan”. Di sekolahlah setiap orang belajar kehidupan dalam arti yang sebenar-benarnya. Di sekolah pulalah, semangat berani

⁴ Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. *Reformasi Kebijakan Pendidikan, Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS), 2009. hlm. 47.

mencoba, semangat bangkit dari kegagalan, dan semangat untuk tidak takut salah, senantiasa dicoba setiap hari tak kenal henti.”

Apa yang disampaikan Herwono tersebut sudah semestinya dapat menggugah hati para praktisi dan pemerhati pendidikan, sebuah harapan mengenai gambaran wajah pendidikan masa depan yang benar-benar harus diperjuangkan dan direalisasikan demi mewariskan semangat terus berkarya, tidak mudah menyerah dan menghadirkan inovasi-inovasi strategis agar dapat menjawab tantangan masa depan yang terus mengalami perubahan dengan cepat.

Potret Buram Pendidikan Nasional: Langkah-langkah Reformasi, Reposisi dan Rekonstruksi

Banyak kalangan menilai bahwa pendidikan nasional saat ini masih memiliki banyak kelemahan-kelemahan yang tentunya membutuhkan kritik demi perkembangan dan kemajuan yang lebih baik, walaupun kontribusinya tidak bisa kita nafikan, bukan berarti eksistensi pendidikan nasional sudah sempurna. Rasa berpuas diri dan memandang bahwa dunia pendidikan nasional telah sempurna merupakan sebuah bentuk kecongkakan intelektual yang akan berakibat buruk terhadap keberadaan dunia pendidikan sendiri. Namun demikian, sikap kritis dalam perspektif ini bukan sekedar kritis yang mengkritik segala hal yang menilai berbeda atau tidak sesuai. Sikap kritis yang dimaksud adalah sikap kritis yang diposisikan secara proporsional. Jangan sampai kritisme dilakukan dalam rangka destruktif. Hanya karena kebencian yang meluap-luap, segala hal yang dinilai tidak benar dan tidak sesuai diserang habis-habisan. Kritisme yang dikembangkan haruslah dilandasi oleh obyektivisme dalam kerangka yang konstruktif. Ketika sebuah kritik dilontarkan, maka berbagai hal harus dipertimbangkan secara cermat. Dengan cara semacam ini, maka kritisme merupakan perangkat evaluasi sekaligus alternatif solusi untuk perbaikan secara bersama-sama yang dilandasi oleh sikap yang penuh kearifan.

Beberapa hal yang menurut praktisi-praktisi pendidikan cukup urgen untuk diperhatikan mengenai potret buram pendidikan nasional dan beberapa langkah solutifnya adalah :

1. Buruknya Infrastruktur Sekolah

Sering kita membaca di media hasil liputan wartawan baik media cetak maupun media elektronik yang mencari dan memotret betapa saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang sarana dan prasarana atau infrastrukturnya jauh dari memadai, bahkan Andrea Hirata dalam novelnya *Laskar Pelangi*, menggambarkan sekolahnya;

“Tak usah melukiskan sekolah kami, karena sekolah kami adalah salah satu dari ratusan atau mungkin ribuan sekolah miskin di seantero negeri ini yang jika disenggol sedikit saja oleh kambing yang senewen ingin kawin, bisa rubuh berantakan. Kami memiliki enam kelas kecil-kecil, pagi untuk SD Muhammadiyah. Maka kami, sepuluh siswa baru ini bercokol selama sembilan tahun di sekolah yang sama dan kelas-kelas yang sama, bahkan susunan kawan sebangku pun tak berubah selama sembilan tahun SD dan SMP itu. Kami kekurangan guru dan sebagian besar SD Muhammadiyah ke sekolah memakai sandal. Kami bahkan tak punya seragam. Kami juga tak punya kotak P3K. Jika kami sakit, sakit apa pun; diare, bengkak, batuk, flu atau gatal-gatal maka guru kami akan memberikan sebuah pil berwarna putih, berukuran besar bulat, seperti kancing jas hujan, yang rasanya sangat pahit. Jika diminum kita bisa merasa kenyang. Pada pil itu ada tulisan besar APC. Itulah pil APC yang legendaris di kalangan rakyat pinggiran Belitong. Obat ajaib yang bisa menyembuhkan segala rupa penyakit.

“Sekolah kami tidak dijaga karena tidak ada benda berharga yang layak dicuri. Satu-satunya benda yang menandakan bangunan itu sekolah adalah

sebatang tiang bendera dari bambu kuning dan sebuah papan tulis hijau tergantung miring dekat lonceng.”⁵

Potret sekolah seperti yang digambarkan Andrea Hirata itu memang terjadi di era 80-an, namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut juga masih bisa kita saksikan di media-media pemberitaan setiap hari, atau mungkin di sekitar kita juga terjadi hal demikian. Hal ini tentunya membutuhkan langkah-langkah yang dapat segera dilaksanakan oleh pemerintah dan para pemegang kebijakan dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Salah satunya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengejar ketertinggalan dunia pendidikan baik dari segi mutu dan alokasi anggaran pendidikan dibandingkan dengan negara lain, UUD 1945 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

2. Kesempatan Mendapat Pendidikan Masih Terbatas

Kesempatan mendapatkan pendidikan masih tetap terbatas meski pemerintah orde baru telah menerapkan kebijakan “wajib” (Wajib Belajar) 9 Tahun, tetapi, kesempatan memperoleh pendidikan dasar ini karena berbagai alasan, masih belum bisa dinikmati seluruh anak bangsa. Kesempatan memperoleh pendidikan yang merupakan salah satu hak dasar kemanusiaan ini semakin menyempit pada pendidikan tingkat menengah dan tinggi.

⁵ Andre Hirata. *Laskar Pelangi*. (Yogyakarta; Benteng Budaya), 2008. hlm. 36

Selain itu, kebijakan pemerintah dalam upaya perluasan pemberian kesempatan mendapatkan pendidikan itu, masih terpusat pada sekolah atau madrasah negeri, dengan hampir tidak memberikan perhatian pada sekolah atau madrasah swasta. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak bangsa semakin menyempit akibat krisis ekonomi yang melanda masyarakat kalangan menengah dan bawah sejak 1997 masih berlangsung sampai sekarang.

Azyumardi Azra menjelaskan, dalam berbagai pembahasan dan perumusan konsep tentang reformasi pendidikan, arah baru pendidikan nasional, yang bisa disebut merupakan salah satu fungsi pokok dan tujuan akhir pendidikan, adalah mempersiapkan anak didik dan warga masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan, melembagakan dan mengembangkan masyarakat madani Indonesia.⁶

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pendidikan nasional jangka panjang seharusnya bertumpu pada usaha-usaha menjamin kesempatan bagi setiap anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat lingkungan masing-masing, dan pada saat yang sama juga memberikan peluang yang luas bagi peningkatan kemampuan pendidikan masyarakat dengan memberikan kesempatan bagi diversifikasi program pendidikan.

3. Profesionalisme Guru dan Tenaga Kependidikan

Arif Rahman (pakar pendidikan) menyatakan bahwa penghasilan sebagai guru Indonesia sangatlah rendah, bahkan, tambahnya, gaji guru lebih rendah dari penghasilan sebagai seorang supir. Pendapat tersebut didukung pula oleh Anwar Arifin (Wakil ketua Komisi VI DPR-RI) yang menekankan perlunya peningkatan kesejahteraan guru. Pendapat yang agak berbeda disampaikan oleh Boediono, Kepala Balitbang Depdiknas, yang mengungkapkan bahwa dalam hal peningkatan kesejahteraan guru hendaknya jangan hanya dilihat dari satu sisi saja. Menurutnya guru itu dapat dipandang dari dua sisi yaitu sebagai buruh dan guru sebagai profesi. Katanya, “Mengenai guru sebagai tenaga kerja, guru itu buruh, dan untuk itu memang tingkat kesejahteraannya harus

⁶ Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokrasi*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2002) hlm. xvii

dinaikkan.” Tapi, masih menurutnya bahwa tidak semua orang yang menjadi guru itu hanya bermotivasi pada uang/penghasilan saja. Ada juga orang yang menjadi guru karena sudah merupakan cita-citanya ingin menjadi guru.⁷

Akan tetapi, terlepas dari pandangan guru sebagai profesi seperti pendapat Boediono tadi, sebagai manusia biasa guru tentunya memerlukan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi secara layak. Apalagi pada masa krisis sekarang ini, dimana harga-harga barang melonjak tinggi. Penghasilan menjadi guru kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup secara layak. Dan dikhawatirkan banyak anak-anak, terutama anak-anak yang pintar, tidak mau menjadi guru. Hal ini berbahaya bagi pendidikan Indonesia di masa mendatang.

Menurut Undang Undang No 12 Tahun 2005 profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Salah satu langkah konkrit yang dilakukan pemerintah adalah memberikan fasilitas pelatihan pemanfaatan media pembelajaran bagi guru. Guru jangan hanya puas menggunakan satu media, tetapi harus menggunakan berbagai media pembelajaran. Sehingga anak tertarik dan senang belajar. Dari berbagai penelitian ternyata siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik daripada hanya dengan ceramah. Selain itu saat ini kita mengenal adanya sertifikasi guru, diharapkan dengan sertifikasi guru tersebut, keprofesionalan seorang guru semakin meningkat dengan memenuhi beberapa kompetensi diantaranya kompetensi Pedagogik, Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Sosial dan Kompetensi Keprofesionalan yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Di dalam Undang Undang tersebut selanjutnya dijelaskan bahwa Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Tunjangan profesi dialokasikan dalam anggaran

⁷ <http://edents.bravepages.com> diakses Senin 17 September Pukul 13.00

pendapatan dan belanja negara (APBN) dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

4. Relevansi yang Masih Timpang dengan Kebutuhan Masyarakat dan Dunia Kerja

Terdapat kecenderungan yang kuat, bahwa dunia pendidikan nasional tidak mampu mengantisipasi dan merespon kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Solusi untuk hal ini seperti yang telah diusahakan dan sekarang digencarkan adalah dengan memperbanyak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Teknik UNY, Pengembangan SMK di masing-masing kabupaten/kota akan dilakukan hingga akhirnya akan dicapai perbandingan antara SMK dengan SMU menjadi 70 : 30. Tujuan untuk terus memperbanyak SMK adalah karena lulusan SMK lebih mudah masuk ke pasar kerja ketimbang lulusan SMA karena umumnya mata pelajaran di SMK sudah disertai dengan praktik keterampilan.

Dalam analisis proyeksi pengembangan SMK ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi yaitu program keahlian yang akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, program keahlian mengalami perkembangan yang wajar (stabil), dan program keahlian yang akan mengalami kejenuhan. Program keahlian yang diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang sangat pesat adalah kelompok program Pertanian, Pariwisata, Perikanan, kelautan, dan Teknologi Informasi. Diperkirakan pada tahun 2020 jumlah SMK yang akan membuka kelompok program tersebut mencapai 6.151. Kelompok program cukup stabil dan diproyeksikan akan mengalami perkembangan yang wajar adalah kelompok program Teknologi dan Industri serta Kelompok Seni dan Kerajinan, diperkirakan akan mencapai 3.178 SMK yang menyelenggarakan program tersebut. Sedangkan kelompok program Bisnis dan Manajemen, merupakan program yang diproyeksikan akan mengalami kejenuhan di pasar kerja dan jumlahnya cenderung akan menurun dan diproyeksikan pada tahun 2020 hanya 923 SMK yang menyelenggarakan program tersebut.⁸

⁸ Sudji Munadi dkk. Pemetaan SMK Se Indonesia (Studi Eksploratif Di Diy, Kalsel, Dan Kaltim) Fakultas Teknik UNY.

Dari prediksi pertumbuhan jumlah SMK di atas, kiranya dapat dijadikan salah satu usaha untuk mengurangi jumlah penduduk Indonesia yang menjadi pengangguran setelah menempuh sekolah tingkat atas, selain itu dapat juga mempercepat usia produktif penduduk Indonesia tanpa harus menempuh pendidikan langsung di Perguruan Tinggi, lulusan SMK sudah bisa diserap oleh dunia kerja.

Selain hal-hal yang telah disebutkan di atas, menurut Tilaar, Reformasi pendidikan nasional dilaksanakan sesuai dengan visi reformasi yaitu terwujudnya tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas ialah masyarakat yang Pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis, dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri, serta berwawasan budaya.⁹

Catatan Akhir

Berbagai macam permasalahan pendidikan seperti buruknya infrastruktur sekolah, terbatasnya kesempatan mengenyam pendidikan di setiap jenjang, profesionalisme guru dan tenaga pendidikan, relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja seperti yang telah diuraikan diatas memang sudah menjadi permasalahan lama yang dialami oleh pendidikan di Indonesia sejak lama. Namun, ditengah banyaknya permasalahan tersebut, para pemerhati pendidikan tidak boleh pesimis dan menghindar dari permasalahan tersebut, sudah semestinya para pemerhati pendidikan bergotong royong bersama-sama untuk mengambil andil sebisa yang mampu dilakukan untuk mengikis berbagai persoalan tersebut. Para pemerhati, akademisi, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia jika mau mengambil bagian sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk berbuat dan memberikan kontribusi demi terlaksananya

⁹ H.A.R. Tilaar. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000). hlm. 7

proses dan hasil pendidikan, bukan tidak mungkin, perlahan tapi pasti, pendidikan yang berkualitas akan dapat dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Pendidik dan tenaga kependidikan mesti mau berubah menyesuaikan diri dengan tantangan zaman yang terus berubah. Karena tidak ada yang tetap kecuai perubahan itu sendiri. Selain hal-hal yang telah disebutkan dia atas, menurut Tilaar, Reformasi pendidikan nasional dilaksanakan sesuai dengan visi reformasi yaitu terwujudnya tatanan kehidupan yang sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945 yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas ialah masyarakat yang Pancasilais yang memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis, dan beradab, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan bertanggung jawab, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, kooperatif dan kompetitif serta memiliki kesadaran dan solidaritas antargenerasi dan antarbangsa. Masyarakat yang cerdas adalah masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, maju dan mandiri, serta berwawasan budaya.

Daftar Rujukan

Andrea Hirata. *Laskar Pelangi*. (Yogyakarta; Bentang Budaya), 2008

Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokrasi*. (Jakarta : Penerbit Buku Kompas), 2002

<http://edents.bravepages.com/edents%20online%20baru/laput%20dody.htm> diakses Senin 22 Agustus 2018 Pukul 13.00

Ismi Dwi Astuti Nurhaeni. *Reformasi Kebijakan Pendidikan, Menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender*. (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS), 2009

Ngainun Naim. *Rekonstruksi Pendidikan Nasional*. (Yogyakarta : TERAS), 2010

Undang Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen